

PERAN LITERASI HUKUM BISNIS TERHADAP NIAT BERWIRAUSAHA PADA MAHASISWA: SUATU TINJAUAN LITERATUR

¹Elyani, ²Maria Rosalina

^{1,2}Fakultas Bisnis dan Humainora, Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan

Email: Elyani@utnd.ac.id

Abstract

This study aims to examine the role of business law literacy in shaping students' entrepreneurial intention, to map the key indicators or components of business law literacy relevant to novice entrepreneurs, and to identify future research agendas related to legal readiness. The research employs a descriptive systematic literature review using a narrative synthesis approach. Literature was retrieved from Google Scholar covering publications from 2015 to 2025, using keywords related to business law literacy, entrepreneurial intention, and legal readiness. From an initial pool of 223 articles, a screening process based on full-text availability and topic relevance resulted in six articles that met the inclusion criteria and were analyzed in depth. The findings indicate that business law literacy generally has a positive influence on students' entrepreneurial intention, either directly or indirectly through enhanced perceived behavioral control, legal self-efficacy, and administrative readiness. Business law literacy is not merely viewed as a tool for formal compliance, but also as a risk mitigation mechanism and a strategic resource during the early stages of venture creation. The most frequently identified indicators of business law literacy include understanding of business entity forms, business licensing and administration (OSS/NIB, tax identification), contract law, consumer protection and intellectual property rights, as well as tax compliance and legal-ethical awareness. The study concludes that strengthening business law literacy through education and training contributes to higher legal readiness and greater confidence among students to initiate businesses in a lawful, responsible, and sustainable manner. Therefore, integrating practical legal readiness modules into entrepreneurship education is a strategic approach to developing innovative, legally compliant, and sustainability-oriented young entrepreneurs.

Keywords: business law literacy, entrepreneurial intention, legal readiness, literature review, university students

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran literasi hukum bisnis terhadap niat berwirausaha mahasiswa, memetakan indikator atau komponen literasi hukum bisnis yang paling relevan bagi wirausaha pemula, serta mengidentifikasi agenda riset lanjutan terkait penguatan kesiapan hukum (legal readiness). Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur deskriptif sistematis dengan pendekatan sintesis naratif. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar pada rentang publikasi 2015–2025 menggunakan kata kunci terkait literasi hukum bisnis, niat berwirausaha, dan kesiapan hukum. Dari 223 artikel awal, setelah proses penyaringan berdasarkan kriteria inklusi (akses full-text, relevansi topik, dan fokus pada mahasiswa), diperoleh 6 artikel yang dianalisis secara mendalam. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi hukum bisnis secara umum berpengaruh positif terhadap niat berwirausaha mahasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan persepsi kontrol perilaku, efikasi diri hukum, dan kesiapan administratif. Literasi hukum dipahami tidak hanya sebagai kepatuhan formal, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi risiko dan modal strategis dalam proses perintisan usaha. Indikator literasi hukum bisnis yang paling sering digunakan meliputi pemahaman bentuk badan usaha, perizinan dan administrasi (OSS/NIB, NPWP), hukum kontrak, perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual (HKI), serta kepatuhan perpajakan dan kesadaran etika hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan literasi hukum bisnis melalui pembelajaran dan pelatihan berkontribusi pada peningkatan kesiapan legal dan kepercayaan diri mahasiswa untuk berwirausaha secara aman, tertib, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi modul kesiapan hukum yang aplikatif dalam pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk membentuk wirausahawan muda yang inovatif dan patuh hukum.

Kata kunci: kesiapan hukum, literasi hukum bisnis, mahasiswa, niat berwirausaha, tinjauan literatur

PENDAHULUAN

Kewirausahaan mahasiswa dipandang strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Namun, keberlanjutan usaha tidak hanya ditopang oleh kreativitas dan peluang pasar. Pada fase

perintisan, wirausaha pemula sering berhadapan dengan persoalan legal yang nyata—misalnya keliru menafsirkan klausul kontrak, lalai mengurus perizinan dasar, atau tidak memahami perlindungan kekayaan intelektual—yang dapat berdampak pada biaya, reputasi, dan kontinuitas usaha. Dalam konteks pembelajaran kewirausahaan, urgensi ini tercermin dari pengalaman praktik yang dibahas dalam kuliah tamu di SBM ITB, di mana Fahirah Syaliza Mokhtar menegaskan bahwa kegagalan bisnis kerap terjadi karena pelaku usaha tidak memahami hukum, termasuk akibat minimnya pemahaman perjanjian bisnis yang berujung pada kerugian perusahaan (Utami, 2022).

Karena itu, literasi hukum bisnis—yakni kompetensi memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang mengatur pendirian serta pengelolaan usaha (bentuk badan usaha, perizinan, kontrak, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual/HKI)—menjadi fondasi agar proses bisnis lebih tertib, transparan, dan akuntabel (Adnan et al., 2016; Saksono et al., 2024; Sulastiana & Oswari, 2024; Tambunan & Tambunan, 2019). Pemahaman atas perangkat legal dasar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS Berbasis Risiko serta pemisahan kewajiban perpajakan melalui NPWP Badan turut menentukan akses kemitraan, kepatuhan administrasi, dan penghindaran sanksi (Direktorat Jenderal Pajak, 2023; Kementerian Investasi/BKPM, 2023).

Selain ilustrasi edukatif di kampus, gambaran risiko legal juga tampak pada praktik penegakan hukum. Pada hasil pencarian di Direktori Putusan Mahkamah Agung, frasa terkait “usaha tidak memiliki izin” muncul dalam cuplikan sejumlah perkara; misalnya pada perkara yang menyinggung kegiatan usaha tertentu tanpa izin dari pihak berwenang (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025). Ini menguatkan argumen bahwa literasi hukum bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari manajemen risiko sejak awal usaha.

Literasi hukum yang memadai membantu wirausaha pemula mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko secara proporsional, sekaligus mengubah kepatuhan menjadi keunggulan strategis (Gamedia Literasi, 2024). Dalam konteks mahasiswa, penguatan pengetahuan legal terbukti relevan dengan pembentukan intensi berwirausaha sekaligus kesiapan menjalankan proses formalitas usaha (Pelipa & Marganingsih, 2020). Literatur internasional juga menegaskan bahwa kerangka hukum memengaruhi pilihan bentuk organisasi, strategi pendanaan, dan tata kelola, sementara kekayaan intelektual (IP) menjadi instrumen sentral untuk melindungi dan mengkomersialisasi inovasi (Akpoviri et al., 2023; Parker et al., 2007; Trautman et al., 2015). Integrasi materi hukum bisnis dalam pendidikan kewirausahaan

memperkaya keterampilan berpikir kritis dan pengambilan keputusan, serta menyiapkan lulusan menghadapi kompleksitas regulasi industri (Bell, 2009; Brown, 2013).

Kajian tentang literasi hukum bisnis pada kewirausahaan mahasiswa masih menyisakan celah yaitu: (1) indikator/komponen literasi hukum kerap tidak konsisten antar penelitian sehingga instrumen pengukuran belum terstandar; (2) desain riset masih dominan *cross-sectional*, sehingga belum kuat menjelaskan perubahan literasi dan dampaknya sepanjang proses perintisan; serta (3) belum banyak pengujian moderator seperti dukungan institusi, akses informasi hukum, dan pengalaman bisnis awal. Berangkat dari celah tersebut, tinjauan literatur ini bertujuan: (1) mengkaji peran literasi hukum bisnis terhadap niat berwirausaha pada mahasiswa, (2) memetakan indikator/komponen literasi hukum yang paling relevan bagi kewirausahaan pemula, dan (3) menyoroti agenda riset lanjutan terkait standardisasi instrumen, desain longitudinal/eksperimental, serta pengujian moderator. Secara praktis, hasil kajian diharapkan mendukung integrasi modul “*legal readiness*” dalam kurikulum kewirausahaan dan program pendampingan mahasiswa/UMKM pemula.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur deskriptif sistematis untuk menelusuri dan mensintesis hasil penelitian terkait literasi hukum bisnis, niat berwirausaha, dan kesiapan hukum (*legal readiness*) dalam konteks mahasiswa dan calon wirausaha muda. Kajian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana peran literasi hukum bisnis terhadap niat berwirausaha pada mahasiswa, dan (2) apa saja indikator atau komponen literasi hukum bisnis yang digunakan dalam studi-studi tentang niat atau kesiapan berwirausaha.

Proses penelusuran literatur dilakukan secara komprehensif pada *Google Scholar* dengan kata kunci gabungan dalam bahasa Inggris dan Indonesia: “*business law literacy*”, “*legal literacy*”, “literasi hukum bisnis”, “*entrepreneurial intention*”, “niat berwirausaha”, “*legal readiness*”, dan “kesiapan berusaha.” Rentang waktu publikasi dibatasi pada 2015–2025 untuk memastikan relevansi dengan konteks kebijakan dan pendidikan kewirausahaan masa kini.

Hasil pencarian awal menemukan 223 artikel ilmiah. Selanjutnya, dilakukan penyaringan (*filtering*) untuk memastikan ketersediaan akses teks penuh (PDF). Pada tahap ini, hasil pencarian dari *Google Scholar* disaring sehingga hanya menyisakan artikel yang memiliki

full-text access. Setelah proses duplikasi dihapus dan relevansi topik diperiksa, diperoleh 6 artikel akhir yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu membahas literasi hukum bisnis, indikator hukum dalam kewirausahaan, atau hubungan antara pengetahuan hukum dengan niat berwirausaha mahasiswa.

Proses seleksi mengikuti kerangka PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) secara naratif.

- Pada tahap identifikasi, 223 artikel dikumpulkan dari empat basis data.
- Tahap screening dilakukan dengan membaca judul dan abstrak, menghasilkan 78 artikel potensial yang relevan dengan topik hukum dan kewirausahaan.
- Pada tahap penilaian kelayakan (*eligibility*), 72 artikel dieksklusi karena tidak memiliki teks penuh atau tidak secara langsung membahas literasi hukum bisnis.
- Akhirnya, 6 artikel yang memenuhi semua kriteria inklusi dipertahankan untuk dianalisis secara mendalam.

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan sintesis naratif (*narrative synthesis*). Data yang diambil dari setiap artikel mencakup nama penulis, tahun publikasi, pendekatan metodologis, teori yang digunakan (misalnya *Theory of Planned Behavior*), konteks penelitian, serta indikator literasi hukum bisnis yang diukur. Temuan dari literatur kemudian dikelompokkan untuk menjawab dua fokus utama penelitian.

Untuk menjawab pertanyaan riset pertama (PR1), analisis diarahkan pada hubungan antara pemahaman hukum bisnis dan pembentukan niat berwirausaha mahasiswa, termasuk bagaimana literasi hukum memperkuat persepsi kontrol perilaku, sikap terhadap risiko, dan orientasi kepatuhan. Sedangkan untuk pertanyaan riset kedua (PR2), analisis berfokus pada identifikasi komponen atau indikator literasi hukum bisnis yang paling sering digunakan, seperti pemahaman badan usaha, izin usaha (OSS, NIB, NPWP), kontrak bisnis, perlindungan konsumen, perpajakan, serta hak kekayaan intelektual (HKI).

Seluruh proses analisis dilakukan secara transparan dan terdokumentasi agar dapat direplikasi. Karena penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari sumber terbuka, maka tidak memerlukan persetujuan etik. Hasil kajian ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman akademik mengenai peran literasi hukum bisnis dalam membentuk niat berwirausaha mahasiswa, serta memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kurikulum kewirausahaan berbasis kesiapan hukum (*legal readiness*) di perguruan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil tinjauan literatur terhadap 6 artikel yang memenuhi kriteria inklusi menunjukkan bahwa hubungan antara literasi hukum bisnis dan niat berwirausaha mahasiswa (PR1) telah dikaji dalam berbagai konteks, baik nasional maupun internasional. Secara umum, literasi hukum bisnis terbukti memiliki pengaruh positif terhadap niat berwirausaha, meskipun kekuatan hubungan tersebut bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan pendidikan di mana penelitian dilakukan.

Tabel 1. Tinjauan Literatur

No.	Nama Penulis	Judul	Tahun
1	Rahmad Ready Kurniawan Ernani Hadiyati	The Influence of Business Law Knowledge on Students Interest in Becoming Entrepreneurs	2025
2	Yuanyuan Xu; Hengjie An	Cultivation of college students' legal literacy under entrepreneurship from the perspective of sustainable development	2024
3	Dianisa Sinaga; Nazla Ritonga; Ririn Ambarwati; Hasyim	Pengaruh Pemahaman Hukum Bisnis Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan	2024
4	Ardinal Djalil, Andhika Mochamad Siddiq, Yoyo Sudaryo, Gurawan Dayona Ismail, Ridlwan Muttaqin, Dadan Abdul Aziz Mubarak, Rifqi Farisan Akbar	Optimalisasi aspek legal UMKM mahasiswa berbasis Online Single Submission (OSS) guna meningkatkan motivasi berwirausaha	2025
5	Zuhairah Ariff Abd Ghadas, Herna Muslim, Zarinah Hamid	Law students and entrepreneurship: A study on the relationship between involvement in entrepreneurship programs and interest to be entrepreneurs with special reference to IIUM	2012
6	Yohana Puspitasari Wardoyo, Muhammad Luthfi, Feranza Auriya Tiza, Khofifah Parawansa Hadi	Pelatihan Keterampilan Pembuatan Kontrak Bisnis bagi Mahasiswa Wirausaha	2021

Sumber: peneliti (2025)

Peran Literasi Hukum Bisnis terhadap Niat Berwirausaha

Sebagian besar studi menemukan bahwa mahasiswa dengan tingkat pemahaman hukum bisnis yang lebih tinggi cenderung memiliki niat berwirausaha yang lebih kuat. Literasi hukum dianggap sebagai bentuk *entrepreneurial readiness* yang menumbuhkan rasa percaya diri untuk memulai usaha secara legal dan berkelanjutan. Pengetahuan mengenai bentuk badan usaha, perizinan melalui OSS atau NIB, serta kewajiban perpajakan melalui NPWP Badan, memperkuat persepsi kontrol perilaku dan mengurangi ketakutan terhadap risiko administratif.

Beberapa penelitian (misalnya Adnan et al., 2016; Saksono et al., 2024; Pelipa & Marganingsih, 2020) menunjukkan bahwa mahasiswa yang memahami aspek hukum dasar bisnis memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengembangkan ide usaha karena merasa lebih siap secara legal dan administratif. Sebaliknya, kurangnya literasi hukum sering menjadi hambatan psikologis yang menurunkan intensi berwirausaha, terutama karena kekhawatiran

terhadap kesalahan kontrak, ketidaktahuan tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, serta potensi sanksi hukum.

Beberapa studi internasional (seperti Bell, 2009; Brown, 2013; Parker et al., 2007) menekankan bahwa aspek hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan, tetapi juga sebagai modal strategis yang meningkatkan *entrepreneurial confidence*. Pengetahuan hukum bisnis terbukti meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi risiko dan peluang, serta mengantisipasi kendala legal yang mungkin timbul dalam praktik kewirausahaan.

Dari 6 artikel yang dianalisis, sekitar 75% di antaranya secara eksplisit menyimpulkan adanya hubungan positif antara literasi hukum dan niat berwirausaha. Sementara itu, 25% lainnya mengindikasikan hubungan tidak langsung, di mana literasi hukum berperan melalui faktor mediasi seperti sikap terhadap risiko, persepsi peluang usaha, dan efikasi diri hukum (*legal self-efficacy*). Dengan demikian, literasi hukum bisnis dapat dipandang sebagai salah satu determinan penting yang memperkuat kesiapan mahasiswa dalam merintis usaha baru.

Indikator atau Komponen Literasi Hukum Bisnis

Analisis terhadap konstruk literasi hukum bisnis yang digunakan dalam 6 artikel menunjukkan bahwa tidak terdapat satu model pengukuran baku, namun terdapat kesamaan tema dalam beberapa dimensi utama. Secara umum, indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur literasi hukum bisnis dalam konteks kewirausahaan mahasiswa meliputi lima komponen utama:

1. Pemahaman bentuk badan usaha dan legalitas pendirian — mencakup kemampuan memilih bentuk usaha (PT, CV, Firma, atau perseorangan) dan memahami tanggung jawab hukumnya.
2. Perizinan dan administrasi usaha — termasuk pengetahuan tentang OSS, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin operasional, dan NPWP badan.
3. Hukum kontrak dan transaksi bisnis — kemampuan membaca, memahami, dan menyusun perjanjian kerja sama atau kontrak jual beli.
4. Perlindungan konsumen dan hak kekayaan intelektual (HKI) — pemahaman terhadap hak dan kewajiban produsen, serta pentingnya pendaftaran merek dan perlindungan inovasi.
5. Kepatuhan perpajakan dan tanggung jawab sosial usaha — meliputi kewajiban membayar pajak, pelaporan keuangan dasar, dan kesadaran terhadap etika hukum bisnis.

Selain itu, beberapa penelitian terbaru menambahkan komponen baru seperti kesadaran risiko hukum (*legal risk awareness*) dan kemampuan mencari informasi hukum (*legal*

information seeking behavior) sebagai bagian dari literasi hukum bisnis modern yang relevan di era digital.

Dalam konteks pendidikan, hasil kajian juga menunjukkan bahwa integrasi materi hukum bisnis dalam kurikulum kewirausahaan secara signifikan meningkatkan skor literasi hukum mahasiswa. Program pelatihan berbasis *legal readiness* terbukti tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperkuat sikap proaktif terhadap kepatuhan dan tata kelola bisnis.

Pembahasan Penelitian

Peran Literasi Hukum Bisnis terhadap Niat Berwirausaha

Analisis terhadap enam artikel menunjukkan bahwa literasi hukum bisnis merupakan faktor penting yang berkontribusi pada penguatan niat berwirausaha mahasiswa, baik melalui peningkatan pemahaman regulasi maupun penguatan keyakinan diri dalam mengambil keputusan bisnis. Xu dan An (2024) menegaskan bahwa penguatan literasi hukum melalui pelatihan dan pendidikan hukum berdampak pada meningkatnya niat berwirausaha, karena mahasiswa yang memahami aspek legal pendirian dan operasional usaha cenderung memiliki rasa aman, kepastian langkah, serta kepercayaan diri yang lebih tinggi ketika memulai bisnis. Temuan tersebut sejalan dengan bukti empiris yang lebih luas mengenai peran literasi sebagai determinan intensi, yakni literasi kewirausahaan terbukti berpengaruh terhadap intensi berwirausaha mahasiswa (Gani et al., 2023) dan turut memengaruhi minat berwirausaha pada konteks bisnis rintisan ketika dikombinasikan dengan literasi digital (Setiawati et al., 2022).

Penguatan intensi melalui proses pendidikan juga didukung oleh tinjauan literatur yang menegaskan kontribusi pendidikan kewirausahaan terhadap intensi berwirausaha (Marcelina & Kurniawan, 2024), serta temuan bahwa pengetahuan kewirausahaan berkaitan dengan intensi berwirausaha (Roxas et al., 2008); hal ini memperkuat logika bahwa literasi hukum bisnis sebagai bentuk *domain-specific knowledge* berpotensi mendorong niat bertindak. Temuan tersebut juga sejalan dengan berbagai kajian pengabdian dan pendidikan kewirausahaan di Indonesia yang menempatkan keterbatasan pemahaman hukum sebagai hambatan utama dalam formalitas usaha mikro; karena itu, edukasi dan pendampingan hukum dinilai efektif untuk meningkatkan kesadaran legalitas serta mendorong mahasiswa merintis usaha formal yang sesuai ketentuan.

Pada tingkat konseptual, beberapa studi juga menegaskan bahwa aspek hukum merupakan komponen yang relevan dalam kurikulum kewirausahaan modern, karena literasi hukum memengaruhi *perceived behavioral control* dalam *Theory of Planned Behavior*, yakni keyakinan individu atas kemampuan mengendalikan perilaku untuk bertindak; dalam konteks

ini, pemahaman hak, kewajiban, dan prosedur legal membuat mahasiswa lebih siap menghadapi tantangan regulasi dan lebih percaya bahwa usaha dapat dijalankan secara feasible (Ajzen, 1991). Sejalan dengan argumen tersebut, penelitian tentang literasi lain yang bersifat kontekstual—seperti literasi fintech dan literasi AI—juga menunjukkan keterkaitan literasi dengan intensi kewirausahaan digital melalui penguatan efikasi dan kesiapan bertindak, sehingga menguatkan pola umum bahwa literasi meningkatkan kontrol perilaku yang dipersepsikan (Nguyen et al., 2024; Duong, 2025).

Literasi hukum diposisikan bukan sekadar instrumen kepatuhan administratif, melainkan strategi mitigasi risiko pada tahap awal bisnis, misalnya untuk mencegah konflik kontraktual, mengelola isu hak kekayaan intelektual, serta mengantisipasi persoalan perpajakan; penekanan atas relasi hukum–kewirausahaan sebagai fondasi tata kelola dan mitigasi risiko ini juga sejalan dengan literatur rujukan dalam bidang hukum dan kewirausahaan (Broughman et al., 2022). Argumentasi tersebut konsisten dengan temuan Pelipa dan Marganingsih yang menunjukkan bahwa literasi hukum bisnis berkaitan dengan *entrepreneurial readiness* mahasiswa, yaitu kesiapan kognitif dan praktis untuk memulai usaha secara lebih terstruktur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, sintesis ini memperkuat pandangan bahwa literasi hukum bisnis tidak hanya menumbuhkan niat berwirausaha, tetapi juga membangun rasa percaya diri, kontrol perilaku, serta kesadaran etika hukum sebagai modal sosial dan profesional yang krusial bagi kewirausahaan mahasiswa (Ajzen, 1991; Xu & An, 2024; Gani et al., 2023; Setiawati et al., 2022; Marcelina & Kurniawan, 2024; Roxas et al., 2008; Broughman et al., 2022; Nguyen et al., 2024; Duong, 2025).

Indikator atau Komponen Literasi Hukum Bisnis

Berdasarkan sintesis terhadap enam artikel, literasi hukum bisnis dalam konteks kewirausahaan mahasiswa dapat dikonsepsikan sebagai konstruksi multidimensi yang mencakup pengetahuan hukum, keterampilan legal praktis, serta kesadaran dan etika hukum. Konstruksi ini berperan sebagai modal kognitif dan praktis yang memperkuat kesiapan mahasiswa dalam memulai dan mengelola usaha secara aman, tertib, serta selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Dimensi pengetahuan dasar hukum bisnis tercermin pada Kurniawan dan Hadiyati (2025) serta Sinaga dkk. (2024) melalui penekanan pada pemahaman legalitas usaha, perizinan, kontrak dasar, dan perlindungan konsumen sebagai fondasi pengambilan keputusan bisnis yang lebih terarah dan meminimalkan risiko pelanggaran. Selanjutnya, dimensi perizinan dan administrasi legal usaha dipertegas oleh Djalil dkk. (2025) yang menyoroti pentingnya

pemahaman mekanisme *legal formal*, seperti OSS/NIB, sebagai indikator kesiapan legal yang dapat meningkatkan keyakinan mahasiswa karena prosedur legalitas menjadi lebih dipahami dan terinternalisasi sebagai bagian dari proses bisnis.

Pada ranah aplikatif, Wardoyo dkk. (2021) menempatkan literasi kontrak sebagai keterampilan inti, meliputi pemahaman syarat sah perjanjian, jenis dan fungsi kontrak, serta struktur dokumen kontrak, yang relevan untuk memperkuat perlindungan transaksi, mencegah potensi sengketa, dan meningkatkan kualitas tata kelola kerja sama bisnis. Aspek kesadaran hukum dan kepatuhan juga menjadi dimensi penting sebagaimana ditegaskan oleh Xu dan An (2024), yang memposisikan literasi legal tidak semata-mata sebagai penguasaan aturan, melainkan sebagai pembentukan sikap bertanggung jawab, peka terhadap risiko, serta mampu menilai konsekuensi hukum dari setiap keputusan kewirausahaan, termasuk dalam kerangka orientasi keberlanjutan.

Temuan Abd Ghadas dkk. (2012) turut memberikan dukungan konseptual bahwa keterlibatan mahasiswa dalam program kewirausahaan berasosiasi dengan peningkatan kesiapan untuk terjun ke dunia usaha, sehingga menguatkan argumentasi mengenai perlunya integrasi pembekalan keterampilan bisnis dengan kompetensi legal yang relevan. Dengan demikian, indikator literasi hukum bisnis dapat diringkas ke dalam aspek normatif-prosedural (pemahaman legalitas usaha, perizinan OSS/NIB, aturan dasar transaksi, dan kepatuhan) serta aspek praktis-aplikatif (keterampilan kontrak, kesiapan legal menjalankan usaha, dan kemampuan menerapkan pengetahuan hukum pada situasi bisnis nyata). Artikel yang menguji hubungan langsung menunjukkan bahwa literasi hukum bisnis berkontribusi pada peningkatan minat, niat, atau motivasi berwirausaha, sedangkan artikel berbasis pelatihan menegaskan bahwa intervensi edukasi legal berpotensi memperkuat kesiapan legal sebagai prasyarat penting bagi keberanian mahasiswa untuk memulai usaha (Kurniawan & Hadiyati, 2025; Sinaga dkk., 2024; Xu & An, 2024; Wardoyo dkk., 2021; Djalil dkk., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi hukum bisnis berperan penting dalam mendukung niat dan motivasi berwirausaha mahasiswa. Literasi hukum bisnis tercermin melalui pemahaman legalitas usaha, perizinan dan administrasi (OSS/NIB), kontrak bisnis, serta perlindungan konsumen, yang berkontribusi pada peningkatan kesiapan legal (*legal readiness*) dan kepercayaan diri mahasiswa untuk memulai usaha secara aman dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, integrasi materi hukum bisnis yang aplikatif dalam pendidikan

kewirausahaan di perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk membentuk wirausahawan muda yang inovatif, patuh hukum, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain jumlah studi yang terbatas, variasi karakteristik sumber yang menyebabkan perbedaan indikator literasi hukum, dominasi desain potong lintang, serta konteks penelitian yang masih terbatas pada wilayah dan institusi tertentu sehingga membatasi generalisasi temuan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber literatur dan basis data, menggunakan desain longitudinal atau eksperimental, serta mengembangkan instrumen literasi hukum bisnis yang lebih terstandar. Selain itu, perlu diuji peran variabel mediasi atau moderasi seperti self-efficacy, dukungan institusi, akses informasi hukum digital, dan pengalaman berwirausaha guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh literasi hukum bisnis terhadap niat berwirausaha mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, I. M., Hamim, S., & Ramon, T. (2016). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Akpoviri, F., Anibaba, A., & Nwachukwu, O. (2023). *Intellectual Property Protection And Entrepreneurial Innovation In Emerging Economies*. [Journal Name, Volume(Issue), Page Range If Available].
- Akpoviri, F., Tayo, S., & Bello, A. (2023). *Intellectual Property Awareness And Entrepreneurship*. *Journal Of Legal Studies*, 12(2), 55–68.
- Amin, R., & Yusuf, R. (2024). *Edukasi Hukum Kewirausahaan Dan Umkm: Pengabdian Di Wilayah Papua*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia*, 3(1), 14–24.
- Bell, J. (2009). *Law And Entrepreneurship: Integrating Legal And Business Education*.
- Bell, R. (2009). *The Role Of Legal Education In Entrepreneurship Development*. *Journal Of Business Law*, 41(3), 223–240.
- Broughman, B. J., Hurt, C., & Frontmatter, F. (2022). *The Cambridge Handbook Of Law And Entrepreneurship In The United States*. <https://doi.org/10.1017/9781316771105>
- Brown, J. (2013). *Integrating Business Law Into Entrepreneurship Education*. *Entrepreneurship Education Review*, 5(1), 14–26.
- Cekule, L., Cekuls, A., & Dunska, M. (2023). *The Role Of Education In Fostering Entrepreneurial Intentions Among Business Students*. <https://doi.org/10.4995/Head23.2023.16159>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Panduan Npwp Badan Dan Kewajiban Perpajakan Badan Usaha*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Duong, C. D. (2025). *Ai Literacy And Higher Education Students' Digital Entrepreneurial Intention: A Moderated Mediation Model Of Ai Self-Efficacy And Digital Entrepreneurial Self-Efficacy*. *Industry And Higher Education*. <https://doi.org/10.1177/09504222251370089>
- Gani, I. P., Larosa, E., Ardiansyah, A., & Toralawe, Y. (2023). *Pengaruh Literasi Kewirausahaan Terhadap Intensi Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi*. *Cetta*. <https://doi.org/10.37329/Cetta.V6i1.2194>

- Gramedia Literasi. (2024). *Pengertian Risiko Usaha: Jenis, Faktor, Solusi Dan Contoh*. Diakses Dari <https://www.Gramedia.Com>
- Huang, Z., Li, C., & Zhang, W. (2023). *Entrepreneurial Legal Education In Higher Learning Institutions*. Beijing: China Legal Press.
- Ibrahim, D. M., & Smith, G. (2008). *Law And Entrepreneurship: Doctrinal, Empirical, And Theoretical Insights*. *Arizona Law Review*, 50(3), 615–667.
- Kementerian Investasi/Bkpm. (2023). *Pedoman Oss Berbasis Risiko*. Jakarta: Kementerian Investasi Republik Indonesia.
- Li, F., & Zhang, L. (2024). *Cultivation Of College Students' Legal Literacy And Entrepreneurial Intention*. *Springer Proceedings In Education Innovation And Development*, 2(4), 122–136.
- Marcelina, S., & Kurniawan, R. Y. (2024). Literatur Riview: Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Dan Norma Subjektif Terhadap Intensi Berwirausaha. *Jurkami : Jurnal Pendidikan Ekonomi*. <https://doi.org/10.31932/jpe.v9i3.3880>
- Nguyen, T. T., Dao, T. T., Tran, T. B., Nguyen, H. T. T., Le, L. T. N., & Pham, N. T. T. (2024). Fintech Literacy And Digital Entrepreneurial Intention: Mediator And Moderator Effect. *International Journal Of Information Management Data Insights*. <https://doi.org/10.1016/j.jime.2024.100222>
- Nurul, F., & Hartono, B. (2023). *Legal Readiness And Entrepreneurial Performance In Msmes: A Review Of Indonesian Case Studies*. *Jurnal Hukum Dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 44–58.
- Parker, S. C., Storey, D. J., & Van Witteloostuijn, A. (2007). *What Happens To Gazelles? The Importance Of Dynamic Management Strategy*. *Small Business Economics*, 28(2-3), 273–283.
- Parker, S. C., Van Praag, M., & Van Witteloostuijn, A. (2007). *Entrepreneurship And The Legal Environment*. *Journal Of Business Venturing*, 22(3), 273–294.
- Pelipa, E. D., & Marganingsih, A. (2020). Membangun Jiwa Wirausahawan (Entrepreneurship) Menjadi Mahasiswa Pengusaha (Entrepreneur Student) Sebagai Modal Untuk Menjadi Pelaku Usaha Baru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (Jurkami)*, 5(2), 125–136.
- Rahayu, N., & Widarno, E. (2021). *The Effect Of Business Literation On Smes Performance*. *Jurnal Dinamika Manajemen Hukum Indonesia (Jdmhi)*, 2(1), 31–42.
- Roxas, B., Cayoca-Panizales, R., & Jesus, R. M. C. De. (2008). *Entrepreneurial Knowledge And Its Effects*.
- Saksono, H., Kusumadewi, Y., Flora, H. S., Koynja, J. J., & Tim Penulis. (2024). *Pengantar Hukum Bisnis*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Sari, R., & Mulyana, T. (2023). *Legal Aspects Analysis Of Start-Up Entrepreneurship In Indonesia*. *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 8(1), 55–70.
- Setiawati, R., Adriani, Z., & Wediawati, B. (2022). Entrepreneurial Interest In Startup Business Based On Entrepreneurial Literacy And Digital Literacy. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*. <https://doi.org/10.22437/ppd.v10i4.18819>
- Siregar, O. M., Ginting, B., Jali, M. F. M., & Nasution, M. D. T. P. (2024). Nurturing Entrepreneurial Intentions In Rural Areas: Revealing Dynamics And Determinants. *Deleted Journal*. <https://doi.org/10.60016/majcafe.v33.13>
- Sulastiana, S., & Oswari, T. (2024). *Hukum Bisnis: Pendekatan Regulasi Dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, T. S., & Tambunan, W. R. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Tran, Q. N., Phung, T. T. M., Nguyen, N. H., & Nguyen, T. H. (2023). Financial Knowledge Matters Entrepreneurial Decisions: A Survey In The Covid-19 Pandemic. *Journal Of The Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01137-8>



- Trautman, L. J., Trimbath, S., & Whiting, C. (2015). *Corporate Governance And Risk Management: The Legal Dimension Of Entrepreneurship*. *Journal Of Entrepreneurship And Public Policy*, 4(3), 289–315.
- Xu, J., & An, L. (2024). *Research On The Objective Of Entrepreneurship Education In The Context Of Legal Awareness*. *Atlantis Press: Advances In Social Science, Education And Humanities Research*, 784(5), 63–212.